

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DENGAN *THIN CAPITALIZATION* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Azura Nur Adila^{1*}, Endah Susilowati²
*Email : 17013010212@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur¹

Abstract. *The aims of this study is to examine and analyze empirically the influence of good corporate governance (institutional ownership and independent board of commissioners) and thin capitalization on tax avoidance at consumer goods industry companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) within the period 2015-2019. Sample in this study are 24 companies, so the total sample is 120 sample which selected by using purposive sampling technique. This study used Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) with SmartPLS 3.0 software to hypothesis examination. The result of this study indicate that Institutional ownership has no significant effect on thin capitalization and tax avoidance, Independent Board Of Commissioners has no significant effect on thin capitalization and has negative significant effect on tax avoidance. Thin capitalization has positive significant effect on tax avoidance, while institutional ownership and independent board of commissioners has no significant effect on tax avoidance with thin capitalization as an intervening variable.*

Keywords: *Corporate Governance, Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Thin Capitalization, Tax Avoidance.*

Abstrak . Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen) dan *thin capitalization* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods industry* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Sampel penelitian ini adalah 24 perusahaan, sehingga total sampel sebanyak 120 sampel yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization* maupun *tax avoidance*, dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, namun memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan *thin capitalization* sebagai variabel intervening.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Thin Capitalization, Tax Avoidance.*

Pendahuluan

Pendapatan nasional terbesar dan terpenting bagi negara salah satunya bersumber dari pajak. Penerimaan pajak yang besar mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki perekonomian yang kuat karena pajak dipungut atas dasar penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak (Sueb, 2020). Pemerintah dengan berbagai upaya mendorong seluruh wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, namun dalam praktiknya penerimaan pajak belum bisa maksimal karena wajib pajak melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak salah satunya yaitu melalui praktik *tax avoidance*. Kekurangan dari peraturan perpajakan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*, dimana strategi untuk mengurangi pajak tersebut dikatakan legal dan tidak menyalahi aturan tentang perpajakan (Darma et al., 2019). Meskipun bersifat legal namun *tax avoidance* dianggap sebagai permasalahan yang rumit karena tidak diinginkan oleh pemerintah selaku fiskus dan juga berisiko bagi perusahaan dengan adanya sanksi berupa denda dan reputasi yang buruk di mata masyarakat (Dewi, 2019).

Praktik *tax avoidance* di Indonesia termasuk tinggi, dimana dari 30 negara Indonesia menduduki urutan ke-11 sebagai negara yang perusahaannya melakukan praktik *tax avoidance* dengan kerugian kurang lebih US\$6,48 miliar. Hasil survei tersebut dilakukan pada tahun 2016 oleh penyelidik IMF Ernesto Crivelly yang kemudian dikaji kembali oleh Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (www.tribunnews.com, 2017). Selain itu, tingkat realisasi pajak yang belum bisa sampai pada target menunjukkan bahwa wajib pajak berupaya menghindari pajak atau melakukan *tax avoidance* (Cita & Supadmi, 2019). Tabel 1 menyajikan target pajak yang diterima negara selama tahun 2015-2019 beserta realisasinya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Persentase
2015	1.294	1.055	81,5%
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.786	1.546	86,6%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Praktik *tax avoidance* yang masih tinggi di Indonesia diharapkan dapat berkurang dengan penerapan yang baik dari tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus *tax avoidance*. Tata kelola perusahaan menurut Agoes & Ardana (2009: 101) diartikan sebagai tatanan yang mengelola tugas dan peranan pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, serta pemangku kepentingan yang lain untuk menjalankan sistem yang terbuka dalam menentukan dan mencapai tujuan perusahaan, dan mengevaluasi kinerjanya. Implementasi *good corporate governance* secara internal dalam perusahaan dilakukan dengan mengendalikan struktur internal seperti proporsi dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, RUPS, dan pertemuan dengan board of director, sedangkan secara eksternal dilakukan melalui pengawasan terhadap perusahaan, pengendalian pasar, dan struktur kepemilikan (Praditasari & Setiawan, 2017).

Selain *good corporate governance*, *thin capitalization* merupakan salah satu strategi perusahaan yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. *Thin capitalization* berarti struktur modal yang dimiliki perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional lebih banyak menggunakan utang daripada modal sendiri atau yang sering disebut dengan "*highly leveraged*" (OECD, 2012). Utang perusahaan yang semakin tinggi mengakibatkan beban yang harus dibayar untuk bunga utang semakin tinggi, dimana beban bunga utang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Adanya *good corporate governance* diharapkan perusahaan akan mematuhi peraturan pemerintah mengenai perbandingan maksimal rasio utang terhadap modal, sehingga praktik *thin capitalization* dapat berkurang.

Subjek penelitian ini merupakan perusahaan sektor *consumer goods industry* yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Hal ini dengan pertimbangan perusahaan *consumer goods industry* adalah salah satu sektor perusahaan manufaktur yang perkembangannya cukup baik (www.kontan.co.id, 2019). Perusahaan *consumer goods industry* memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan laba tinggi. Laba perusahaan yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak yang juga semakin besar, sehingga timbul kecenderungan untuk menekan pembayaran pajak melalui *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan barang konsumsi menjadi salah satu incaran investor sehingga penting bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan kepercayaan investor dengan menerapkan *good corporate governance*.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara satu atau beberapa orang yang merupakan pemilik atau disebut dengan *principal* dengan orang lain atau yang disebut dengan agen, dimana pemilik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan agen melakukan pekerjaan atas nama pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan antara pemegang saham selaku *principal* dengan manajer selaku agen terjadi akibat adanya perbedaan pandangan di antara mereka termasuk dalam hal keputusan melakukan *tax avoidance*. Manajer melakukan *tax avoidance* karena didasarkan pada keputusan jangka pendek untuk memaksimalkan laba, sedangkan pemegang saham lebih melihat dampak secara jangka panjang yang diakibatkan jika melakukan *tax avoidance* seperti reputasi perusahaan yang buruk di mata masyarakat. Untuk mengawasi tindakan manajer, maka pemegang saham akan mengeluarkan biaya agar manajer tidak melakukan *tax avoidance* (Sulistiyawati et al., 2020).

Untuk meningkatkan kepentingannya di perusahaan, manajer perusahaan dapat melakukan tindakan *thin capitalization* (Safrudin & Suryaningrum, 2020). Kepemilikan institusional sebagai struktur kepemilikan diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dengan adanya kemampuan untuk mengawasi tindakan manajemen dengan lebih ketat. Pengaturan penggunaan utang perusahaan akan dilakukan dengan lebih hati-hati mengingat adanya pengawasan yang ketat tersebut. Penelitian Waluyo & Doktoralina (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *thin capitalization*, sedangkan penelitian Safrudin & Suryaningrum (2020) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *thin capitalization*.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *thin capitalization*

Dewan komisaris independen menurut Putra & Suardana (2019) diartikan sebagai dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis dengan direksi atau pemegang saham. Pengambilan keputusan manajemen perusahaan akan diawasi oleh dewan komisaris independen termasuk dalam hal struktur modal perusahaan agar tidak

menyalahi peraturan. Penelitian Safrudin & Suryaningrum (2020) menunjukkan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen di perusahaan, maka praktik *thin capitalization* akan semakin berkurang.

H₂: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *thin capitalization*

Salah satu langkah eksternal dalam menerapkan *good corporate governance* adalah melalui struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang dianggap mampu mengurangi praktik *tax avoidance* perusahaan adalah kepemilikan institusional. Penelitian Marlinda et al. (2020) mengungkapkan jika kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persentase kepemilikan institusional yang semakin tinggi dalam perusahaan dapat menurunkan praktik *tax avoidance* karena pengawasan dari investor institusional yang semakin tinggi. Hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian Tandean & Winnie (2016) yang menemukan jika kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris independen diartikan sebagai pihak yang tidak menjabat sebagai direktur dalam sebuah perusahaan dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi atau pemegang saham pengendali (Ariawan & Setiawan, 2017). Sebagai pihak yang independen dewan komisaris independen bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Hasil penelitian Putri et al. (2018) menunjukkan jika komisaris independen berpengaruh dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti jumlah dewan komisaris independen yang semakin tinggi dapat menurunkan praktik *tax avoidance*. Adanya pengawasan dari dewan komisaris independen membuat perusahaan lebih patuh terhadap peraturan termasuk mengenai praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Putri & Chariri (2017) dimana dewan komisaris independen didapati tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₄: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Thin capitalization dikenal sebagai strategi dalam penyusunan struktur modal yang memiliki dampak signifikan terhadap perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin banyak tingkat utang perusahaan, maka beban bunga utang yang harus dibayar perusahaan akan semakin tinggi, sehingga berakibat pada semakin rendahnya jumlah penghasilan yang dikenakan pajak (Sianipar et al., 2020). Ketika penghasilan kena pajak semakin rendah, maka perusahaan akan memiliki keuntungan yaitu berkurangnya beban pajak yang harus dibayar. Penelitian Nadhifah & Arif (2020) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi pembiayaan operasional perusahaan dengan utang maka berakibat pada praktik *tax avoidance* yang semakin tinggi di perusahaan. Penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *thin capitalization* ditemukan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₅: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan semakin tinggi karena modal yang mereka investasikan kepada perusahaan biasanya jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itu, tindakan oportunistik manajemen diharapkan bisa lebih terkontrol sehingga perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tetap memerhatikan kepentingan pemegang saham. Penggunaan utang berbunga yang besar dalam perusahaan dapat memengaruhi penentuan penghasilan kena pajak, dimana beban bunga utang dapat

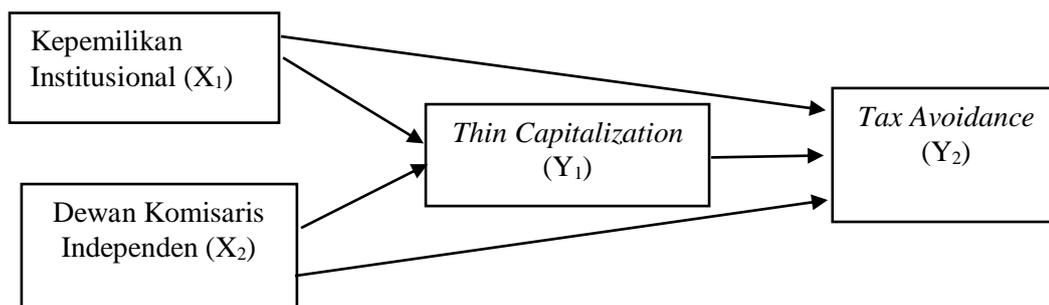
menurunkan pajak yang harus dibayar. Investor institusional dapat mengawasi perusahaan agar tidak melakukan praktik *thin capitalization*, dengan *thin capitalization* yang semakin kecil maka *tax avoidance* diharapkan dapat menurun.

H₆: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *thin capitalization*

Keberadaan dewan komisaris independen dapat menjadi pengawas untuk perusahaan agar menerapkan *good corporate governance*. Sebagai pihak yang independen, mereka dapat mendorong perusahaan agar selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan termasuk mengenai penggunaan utang perusahaan. Dewan Komisaris Independen yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik yaitu mengawasi perusahaan seharusnya membuat perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menggunakan utang yang tinggi agar terhindar dari praktik *thin capitalization*. Ketika perusahaan mampu mengendalikan utangnya maka beban bunga utang dapat lebih terkontrol sehingga praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir

H₇: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *thin capitalization*

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti (2021)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek dari penelitian yaitu kepemilikan institusional (x_1), dewan komisaris independen (x_2), *thin capitalization* (y_1), dan *tax avoidance* (y_2).

Tax avoidance menurut Marlinda et al. (2020) didefinisikan sebagai cara yang ditempuh oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah hukum agar pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir. Penelitian ini mengukur *tax avoidance* dengan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*, yaitu jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan untuk beban pajak dibandingkan laba perusahaan sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Skala rasio digunakan sebagai pengukur variabel ini. Pengukuran *tax avoidance* dengan *Cash ETR* mengacu pada penelitian (Putri & Chariri, 2017).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti LSM, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi di dalam dan luar negeri yang dihitung dalam persentase Supriadi (2020: 128). Pengukuran

kepemilikan institusional penelitian ini dilakukan dengan perbandingan antara kepemilikan saham pihak institusional terhadap jumlah saham beredar perusahaan yang mengacu pada penelitian Marlinda et al. (2020). Skala rasio digunakan sebagai pengukur variabel ini.

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 menyebutkan dewan komisaris independen adalah pihak yang termasuk dari anggota dewan komisaris dan memenuhi persyaratan serta berasal dari luar emiten. Pengukuran variabel dewan komisaris independen yang digunakan penelitian ini adalah dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris perusahaan yang merujuk pada penelitian Marlinda et al. (2020). Skala rasio digunakan sebagai pengukur variabel ini.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

Thin capitalization diartikan sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyusunan struktur modal yang lebih banyak menggunakan utang daripada modal ekuitas untuk membiayai operasional perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai pengukur *thin capitalization* yang diperoleh dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Nugroho & Suryarini (2018).

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang listing di BEI selama tahun 2015-2019 sebagai populasi penelitian. Sampel ditentukan secara *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik untuk menentukan sampel melalui beberapa pertimbangan tertentu. Tabel 2 menyajikan informasi mengenai beberapa kriteria yang digunakan penelitian ini untuk menentukan sampel.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor <i>consumer goods industry</i> yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019	41
2	Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak secara berturut-turut pada tahun 2015-2019 dan tidak menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangan	(3)
3	Perusahaan yang memiliki laba negatif selama periode	(11)
4	Perusahaan tidak memiliki data yang lengkap	(0)
5	Perusahaan memiliki CETR lebih dari 1	(3)
	Total perusahaan sampel terpilih	24
	Total sampel penelitian selama periode pengamatan (5 tahun)	120

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur sektor *consumer goods industry* yang listing di BEI selama periode 2015-2019. Sumber data diperoleh dari *website* BEI pada alamat www.idx.co.id serta *website* resmi dari tiap perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah SEM-PLS dengan memakai software SmartPLS 3.0. Terdapat dua tahapan yang dilakukan dalam *Structural Equation Modeling* yaitu, analisis *outer model* dan *inner model*. Analisis *outer model* termasuk uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan uji *reliabilitas*, sedangkan *inner model* dilakukan melalui pengamatan terhadap nilai *R-square* dan *Q-square*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Gambaran statistik deskriptif dari data yang digunakan penelitian ini disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Kepemilikan institusional (X1)	120	0,705	0,051	0,961	0,202
Dewan Komisaris Independen (X2)	120	0,428	0,200	0,800	0,111
<i>Thin Capitalization</i> (Y1)	120	0,764	0,076	2,909	0,663
<i>Tax Avoidance</i> (Y2)	120	0,277	0,071	0,764	0,126

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 3 dari hasil uji statistik deskriptif variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimal 0,071 yang dimiliki oleh PT Kino Indonesia, sedangkan nilai maksimal 0,764 merupakan milik PT Tempo Scan Pasific. Nilai rata-rata 0,277 berarti bahwa praktik *tax avoidance* di perusahaan *consumer goods industry* tinggi karena nilai CETR yang rendah menunjukkan bahwa *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi, serta penyimpangan data sebesar 0,126.

Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimal 0,051 yang merupakan milik PT Wismilak Inti Makmur, sedangkan nilai maksimal dari data yaitu 0,961 merupakan milik PT Sekar Laut. Nilai rata-rata 0,705 menunjukkan struktur

kepemilikan institusional di perusahaan *consumer goods industry* termasuk tinggi, serta penyimpangan data menunjukkan 0,202.

Variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai minimal 0,200 yang merupakan milik PT Pyramid Farma, sedangkan nilai maksimal dari data 0,800 merupakan milik PT Unilever Indonesia. Nilai rata-rata 0,428 berarti bahwa rata-rata perusahaan *consumer goods industry* telah mematuhi aturan jumlah minimal dewan komisaris independen yaitu 30%, serta penyimpangan data menunjukkan 0,111.

Hasil uji statistik deskriptif variabel *thin capitalization* menunjukkan nilai minimal 0,076 yang merupakan milik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido, sedangkan nilai maksimal dari data yaitu 0,764 merupakan milik PT Tempo Scan Pasific. Nilai rata-rata 2,909 berarti bahwa praktik *thin capitalization* di perusahaan *consumer goods industry* masih berada dibawah batas maksimal, serta penyimpangan data sebesar 0,663.

Nilai *R-square*

Nilai *R-square* menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen. Nilai *R-square* dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai *R-Square* (R^2)

	Nilai <i>R-Square</i> (R^2)
<i>Tax Avoidance</i> (CETR)	0,069
<i>Thin Capitalization</i> (TCAP)	0,056

Sumber: Data Diolah (2021)

Dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki nilai *R-Square* 0,069 untuk *tax avoidance* yang berarti variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan *thin capitalization* mampu memengaruhi variabel *tax avoidance* sebesar 6,9% sedangkan 93,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Nilai *R-square* untuk variabel *thin capitalization* adalah sebesar 0,056 yang berarti variabel *thin capitalization* dipengaruhi oleh variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen sebesar 5,6% sedangkan 94,4% yang lain dipengaruhi variabel lainnya yang tidak digunakan untuk penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan *path coefficient test*. Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik (t-hitung) dengan nilai t-tabel yang ditentukan yaitu 1,96. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
INST -> TCAP	-0,011	-0,014	0,075	0,144	0,885
DKI -> TCAP	0,239	0,229	0,150	1,598	0,111
INST -> CETR	-0,123	-0,127	0,090	1,367	0,172
DKI -> CETR	0,240	0,243	0,092	2,614	0,009

TCAP-> CETR	-0,163	-0,162	0,080	2,043	0,042
INST -> TCAP-> CETR	0,002	0,004	0,014	0,131	0,896
DKI -> TCAP-> CETR	-0,039	-0,040	0,035	1,112	0,267

Sumber: Data Diolah (2021)

Hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *thin capitalization*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis kepemilikan institusional dengan *thin capitalization* memiliki nilai *original sample*-0,011 dengan signifikansi 0,885 > 0,05 yang berarti hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Safrudin & Suryaningrum (2020) serta Nuraini & Marsono (2014) yang menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak dapat memengaruhi praktik *thin capitalization*. Hal tersebut berarti investor institusional tidak menjalankan perannya untuk mengawasi perusahaan agar tidak menjalankan praktik yang menguntungkan kepentingannya sendiri serta menyalahi aturan, investor institusional justru hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Adanya hubungan istimewa antara investor institusional dengan manajemen perusahaan juga menyebabkan praktik *thin capitalization* tidak mampu diminimalisir meskipun kepemilikan institusional suatu perusahaan tinggi.

Hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *thin capitalization*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dewan komisaris independen dengan *thin capitalization* memiliki nilai *original sample* 0,239 dengan signifikansi 0,111 > 0,05 yang berarti 2 ditolak. Dewan komisaris independen tidak dapat ikut mengambil keputusan secara langsung terkait kebijakan struktur modal yang digunakan oleh perusahaan, apakah pembiayaan operasional perusahaan lebih besar menggunakan utang atau modal. Besar kecilnya ukuran dewan komisaris independen tidak dapat menurunkan praktik *thin capitalization* perusahaan. Penelitian Dewi & Dewi (2018) tentang struktur modal yang diukur dengan *debt to equity ratio* menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio DER.

Hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 3, kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* memiliki nilai *original sample* 0,123 dengan signifikansi 0,172 > 0,05 yang berarti hipotesis 3 ditolak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tandean & Winnie (2016), Putri et al., (2018), Darma et al., (2019), dan Moeljono (2020) dimana proporsi kepemilikan institusional baik dalam jumlah yang besar atau kecil tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Ketidakmampuan kepemilikan institusional dalam menekan praktik *tax avoidance* menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagai langkah penerapan *good corporate governance* secara eksternal tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan oportunistik manajemen perusahaan termasuk praktik *tax avoidance*. Investor institusional yang juga menginginkan laba yang tinggi dari perusahaan justru akan mendukung praktik *tax avoidance*.

Hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* memiliki nilai

original sample 0,240 dengan signifikansi $0,009 < 0,05$ yang berarti hipotesis 4 diterima. Nilai *original sample* positif menunjukkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka CETR juga semakin tinggi, CETR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa *tax avoidance* perusahaan rendah. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ariawan & Setiawan (2017) serta Sulistyawati et al. (2020) yang menunjukkan jika besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen di perusahaan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan dewan komisaris independen yang ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan profesionalnya mampu mengawasi manajemen dan memberikan nasihat kepada direksi agar menghindari tindakan *tax avoidance*.

Hipotesis kelima dari penelitian ini yaitu *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis *thin capitalization* dengan *tax avoidance* memiliki nilai *original sample* -0,163 dengan signifikansi $0,042 < 0,05$ yang berarti hipotesis 5 diterima. Nilai *original sample* negatif menunjukkan semakin tinggi *thin capitalization* maka CETR semakin rendah, CETR yang rendah menunjukkan bahwa *tax avoidance* perusahaan tinggi. Penelitian Jumailah (2020), Nadhifah & Arif (2020), Sueb (2020), Prastiwi & Ratnasari (2019), dan Falbo & Firmansyah (2018) menunjukkan hasil yang sama, dimana beban bunga yang tinggi dari praktik *thin capitalization* yang semakin tinggi di perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan adanya pengurang dari penghasilan kena pajak. Perbedaan perlakuan perpajakan antara pengembalian modal dalam bentuk deviden yang justru dikenakan pajak penghasilan dengan pembayaran beban bunga utang yang dapat menurunkan pembayaran pajak menjadikan praktik *thin capitalization* sebagai strategi yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak.

Hipotesis keenam dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *thin capitalization*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis kepemilikan institusional dengan *tax avoidance* melalui *thin capitalization* memiliki nilai *original sample* 0,002 dengan signifikansi $0,896 > 0,05$ yang berarti hipotesis 6 ditolak. Ketidakikutsertaan investor institusional dalam mengawasi tindakan manajemen perusahaan menyebabkan besar atau kecilnya persentase kepemilikan institusional yang ada di perusahaan tidak mampu memengaruhi *tax avoidance* meskipun dimediasi oleh *thin capitalization*. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi tidak selalu mampu mengurangi praktik *thin capitalization* di perusahaan, sehingga *tax avoidance* juga tidak dapat ditekan.

Hipotesis ketujuh dari penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *thin capitalization*. Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dewan komisaris independen dengan *tax avoidance* melalui *thin capitalization* memiliki nilai *original sample* -0,039 dengan signifikansi $0,267 > 0,05$ yang berarti hipotesis 7 ditolak. Dewan komisaris independen memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar tidak mengambil keputusan yang melanggar hukum, namun tidak boleh ikut serta dalam memutuskan kebijakan operasi perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara langsung untuk memastikan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* yang melanggar hukum tetapi tidak dapat ikut memutuskan pengambilan keputusan terkait struktur modal, sehingga tidak dapat memengaruhi *thin capitalization*.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap *thin capitalization* dan *tax avoidance*, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. *Thin capitalization* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi bukan merupakan variabel mediasi atau intervening antara kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Saran untuk penelitian sejenis selanjutnya dapat memasukkan perusahaan manufaktur sektor lain selain sektor *consumer goods industry* untuk memperluas sampel penelitian. Ada baiknya bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan proksi dari *good corporate governance* selain variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen, misalnya dengan menggunakan variabel komite audit, komite remunerasi, kualitas audit, dan sebagainya. Variabel *tax avoidance* sendiri pengukurannya dapat dilakukan dengan ukuran yang lain seperti *Accounting Effective Tax Rate* (GAAP ETR), *Current Effective Tax Rate* (Current ETR), atau nilai *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD). Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel mediasi lain yang lebih cocok dengan model penelitian, atau menggunakan variabel independen lain yang kemungkinan besar dapat memengaruhi *thin capitalization* dan *tax avoidance* seperti multinasionalitas, pemanfaatan *tax heaven*, dan ketidakpastian pajak.

Daftar Pustaka

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29, 912–927.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Dewi, N. K. E., & Dewi, S. K. S. (2018). Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 5139–5167. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i09.p19>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 171–189.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–

360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 53(9), 1689–1699.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nugroho, A., & Suryarini, T. (2018). Determinant of Thin Capitalization in Multinational Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 69–78. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.27>
- Nuraini, N. S., & Marsono. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–9.
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper For Country Tax Administrations*. http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.thin_capitalization_background.pdf
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Putra, M. K. R., & Suardana, I. K. A. (2019). Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Pengaruh Komponen Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 119. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p05>
- Putri, A. Z., Nazar, M. R., & Kurnia. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI Periode 2013-2015). *e-Proceeding of Management*, 5(1), 558–565.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.

- Safrudin, J. D., & Suryaningrum, D. H. (2020). Determining Factors of Thin Capitalization Practices in Indonesia. *Proceeding Book of The 2 International Conference on Business and Banking Innovations (ICOBBI)*.
- Sianipar, N. K., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). The Determinants of Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies. *International Journal of Research and Review*, 7(July), 237–242.
- Simanjuntak, J. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*. www.tribunnews.com. Diakses pada 26 November 2020. <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3#:~:text=perusahaan 30 negara.,Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,46%2C7 miliar dolar AS.>
- Sueb, M. (2020). Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), Press. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.2052>
- Sulistyawati, A. I., Setiawan, F. A., & Santoso, A. (2020). Determinan Penghindaran Pajak. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 1(2), 46-59.
- Supriadi, I. (2020). *Motode Riset Akuntansi (Edisi-1)*. Yogyakarta: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=yhz-DwAAQBAJ&pg=PA128&dq=kepemilikan+institusional&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiWmK7Mgr3tAhUSwTgGHf1NCV8Q6AEwBHoECAYQAg#v=onepage&q=kpemilikan institusional&f=false>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Waluyo, W., & Doktoralina, C. M. (2018). Factors affecting tax avoidance through thin capitalisation: Multinational enterprises in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, 8(3), 210–216. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3436024>